

EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SARANA PRASARANA DI SMK NEGERI 1 DAN SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA

EVALUATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS INFRASTRUCTURE FACILITIES AT SMK NEGERI 1 AND SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA.

Oleh: Larasati Wahyu Puspita Sari, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yayasocto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang ada di SMKN 1 dan SMKN 7 Yogyakarta pada SPM Sarana Prasarana. Penelitian ini merupakan penelitian model evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini SMKN 1 dan SMKN 7 Yogyakarta sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, checklist dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketercapaian SMKN 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana sebesar 74,88% (memuaskan) dengan tingkat kesenjangan sebesar 25,12%. Sementara ketercapaian SMKN 7 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana sebesar 76,77% (memuaskan) dengan tingkat kesenjangan sebesar 23,23%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketercapaian SMKN 7 Yogyakarta dalam memenuhi SPM Sarana Prasarana lebih baik dibandingkan SMKN 1 Yogyakarta dengan selisih 1,89%. Meskipun demikian keduanya dalam kategori memuaskan.

Kata kunci: evaluasi, ketercapaian standar pelayanan minimal, dan sarana prasarana.

Abstract

This study aims to determine the level of achievement of the implementation of the minimum service standards for education in SMK Negeri 1 and SMK Negeri 7 Yogyakarta on minimum service standards infrastructure facilities. This study is an evaluation model using a quantitative approach. Subjects in this study were SMK Negeri 1 and SMK Negeri 7 Yogyakarta as the unit of analysis. Data collection techniques in this study using observation, checklists and documentation as supporting data. Data analysis techniques used in this research is the quantitative descriptive analysis techniques. Based on this research can be concluded that the achievement of SMK Negeri 1 Yogyakarta to meet the minimum service standards infrastructure for 74.88 % in the category of satisfying the inequalities of 25.12 %. While the achievement of SMK Negeri 7 Yogyakarta to meet the minimum service standards infrastructure better than SMK Negeri 1 Yogyakarta by a margin of 1.89%. Nevertheless both are in satisfactory category. Results are based on the percentage of the acquisition of the five components of the minimum service facilities and infrastructure which include: 1) land component, 2) building components, 3) common learning space component, 4) component supporting room, 5) component specific learning spaces.

Keywords: evaluation, implementation of minimum service standards, and infrastructure.

PENDAHULUAN

Era globalisasi membuat segala sesuatunya dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam perkembangan zaman. Tidak hanya dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya namun juga memberi dampak besar pada aspek pendidikan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi antar negara

Asean. Dengan adanya kesepakatan MEA tersebut tentu saja memberikan dampak yang bermacam-macam terhadap negara kita, yaitu bebasnya arus investasi, barang dan jasa hingga kepada tenaga kerja yang terampil. Apabila dilihat dari berbagai macam dampak yang ditimbulkan maka dapat kita lihat ada banyak dampak positif untuk negara kita, salah satunya adalah tenaga kerja dari Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dengan bebas bekerja pada perusahaan-perusahaan asing di negara-negara lain di ASEAN.

Dengan dilatar belakangi hal tersebut, maka sudah pasti pendidikan menjadi pokok penting dalam mengikuti arus ekonomi global yang tengah terjadi saat ini. Seperti yang tertulis dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, karena itulah pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Besar harapan masyarakat bahwa pendidikan mampu membawa perubahan pada Negara kita yang tengah berkembang menjadi Negara maju, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki.

Persaingan di dunia kerja yang begitu ketat, tidak hanya menitikberatkan pada kematangan konsep tetapi juga pada penguasaan teknik-teknik dalam bekerja yang baik dan benar. Salah satu faktor tersebut ikut melatarbelakangi himbuan dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan kejuruan yang dimana tidak hanya mengandalkan penguasaan materi tetapi juga memiliki ketrampilan yang baik dalam kerja lapangan. Saat ini pemerintah sedang gencar mempromosikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pilihan pendidikan yang paling tepat bagi siswa-siswi yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas. Seperti yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Pasal 2 No 15 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.”

Dengan demikian sudah jelas bahwa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sebuah jenis pendidikan yang sudah diakui secara sah oleh pemerintah sebagai pilihan pendidikan yang berkualitas. Bukan tanpa alasan, tetapi lulusan SMK dianggap dan telah terbukti lebih memiliki

kesiapan kerja dibandingkan dengan siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa SMK merupakan sekolah menengah yang berbasis kejuruan yang berorientasi untuk menciptakan lulusannya siap bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang mereka ambil, baik di dunia industri maupun dengan berwirausaha.

Akan tetapi masih saja banyak orang tua yang enggan memilih sekolah kejuruan sebagai pilihan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal yang sangat wajar apabila dikaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, dimana muncul anggapan bahwa hanya dengan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas maka siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu Perguruan Tinggi. Pemerintah saat ini sedang mencanangkan memiliki program mengubah sekolah SMU menjadi SMK dengan proporsi SMK sebanyak 70% dan SMU sebanyak 30%. Perubahan ini disebabkan dengan banyaknya pengangguran produktif yang berasal dari lulusan SMU, karena di SMU tidak dibekali dengan keahlian kerja. Berbeda dengan SMK yang mana di dalam proses pendidikannya hampir semua ilmu yang diperoleh dibekali dengan keterampilan kerja yang cukup untuk menghadapi dunia kerja. Ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi pemerintah dan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan pada khususnya, tentang bagaimana upaya mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan mutu SMK dalam berbagai aspek. Zamroni dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Peningkatan Mutu* (2011: 9) mengungkapkan bahwa “mutu merupakan suatu faktor atau variable yang terkait dengan lingkungan kondisi dan kultur tertentu. Dalam dunia pendidikan mutu merupakan produk dari suatu sistem pendidikan.” Dari situ kita dapat melihat bahwa mutu merupakan tolak ukur keberhasilan tentang sistem pendidikan yang

telah berjalan pada setiap sekolah, baik atau buruknya tergantung pada bagaimana sekolah menjalankan sistem pendidikannya.

Mutu sangat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan bentuk pendidikan seperti apa yang diinginkan. kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana suatu sistem pendidikan dapat menghasilkan mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, jawabnya adalah dengan pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal mengenai Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Isi dari standar pelayanan minimal sendiri pada intinya mengatur tentang syarat-syarat sekolah dalam mengelola dan menjalankan sistem pendidikannya, baik berupa proses Kegiatan Belajar Mengajar, kompetensi Tenaga Pendidik hingga kelengkapan alat yang digunakan sebagai sarana dan prasarana belajar.

SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 7 Yogyakarta merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki beberapa pilihan kompetensi keahlian yang ditawarkan dalam program pendidikannya., yaitu Administrasi Perkantoran, Akutansi, Tata Niaga (penjualan), Multimedia, dan usaha perjalanan wisata. Saat ini kedua sekolah tersebut telah berjalan dengan baik, akan tetapi seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan tuntutan pendidikan yang semakin banyak menuntut pihak pengelola sekolah harus berkompetisi untuk meningkatkan mutu sekolah. salah satu caranya adalah dengan terus mengevaluasi setiap hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan tetap terus mengacu pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja kelengkapan sarana prasaran pendidikan menjadi satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah. Proses kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik dan tenang apabila masih ada saja

hal-hal yang menjadi kendala, seperti status kepemilikan lahan bangunan sekolah, tersedianya ruang pembelajaran khusus terutama bagi sekolah menengah kejuruan yang memiliki beberapa pilihan jurusan, kelengkapan alat peraga dalam proses kegiatan belajar mengajar,dll. Diharapkan dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal yang diberikan oleh pemerintah, maka mutu sekolah menengah kejuruan akan semakin meningkat dan menarik minat masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal sarana prasarana di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 7 Yogyakarta pada Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian model evaluasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 36-37) evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria setelah itu diambil kesimpulan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Proses penelitian dilakukan di 2 Sekolah Menengah Kejuruan, yang terdiri dari SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 7 Yogyakarta masing-masing sekolah berada di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Desember 2015

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 7 Yogyakarta sebagai unit analisis.

Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, checklist dan dokumentasi sebagai data pendukung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif.

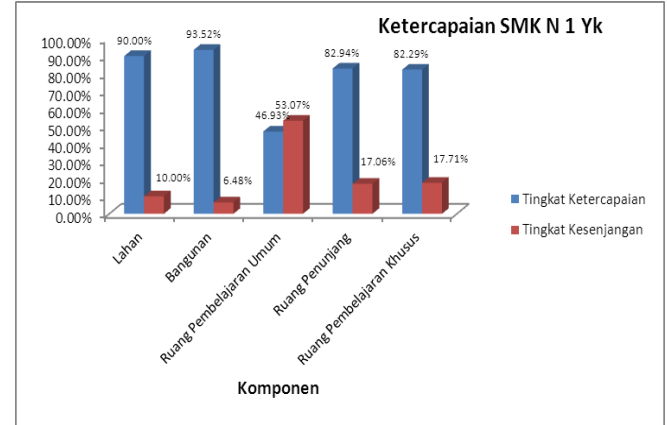
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketercapaian SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal sarana prasarana SMK Negeri 1 Yogyakarta memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 74,88% dan memiliki tingkat kesenjangan sebesar 25,12%. Untuk komponen lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 90,00% dan tingkat kesenjangan sebesar 10,00%. Untuk komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 93,52% dan tingkat kesenjangan sebesar 6,48%. Untuk komponen ruang pembelajaran umum memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 46,93% dan tingkat kesenjangan sebesar 53,07%. Untuk komponen ruang penunjang memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 82,94% dan tingkat kesenjangan sebesar 17,06%. Untuk komponen ruang pembelajaran khusus memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 82,29% dan tingkat kesenjangan sebesar 17,71%. Dengan demikian komponen ruang pembelajaran umum memiliki tingkat kesenjangan yang paling besar dibandingkan komponen lain. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pada komponen ruang pembelajaran umum.

Hasil perbandingan ketercapaian dan kesenjangan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

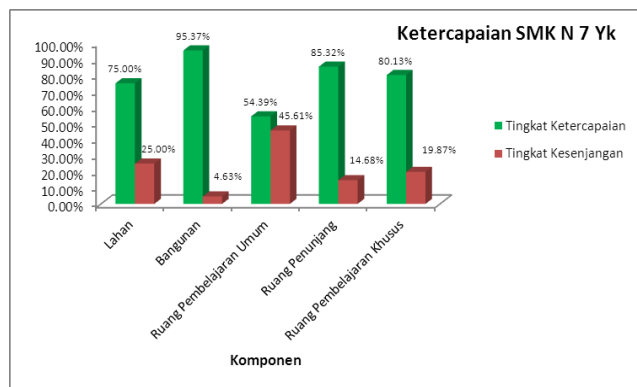


Gambar 1. Perbandingan Ketercapaian dan Kesenjangan SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam Memenuhi SPM

2. Ketercapaian SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal sarana prasarana SMK Negeri 1 Yogyakarta memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 76,77% dan memiliki tingkat kesenjangan sebesar 23,23%. Untuk komponen lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 75,00% dan tingkat kesenjangan sebesar 25%. Untuk komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 95,37% dan tingkat kesenjangan sebesar 4,63%. Untuk komponen ruang pembelajaran umum memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 54,39% dan tingkat kesenjangan sebesar 45,61%. Untuk komponen ruang penunjang memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 85,32% dan tingkat kesenjangan sebesar 14,68%. Untuk komponen ruang pembelajaran khusus memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 80,13% dan tingkat kesenjangan sebesar 19,87%. Dengan demikian komponen ruang pembelajaran umum memiliki tingkat kesenjangan yang paling besar dibandingkan komponen lain. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada komponen ruang pembelajaran umum.

Hasil perbandingan ketercapaian dan kesenjangan SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam memenuhi SPM dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Perbandingan Ketercapaian dan Kesenjangan SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam Memenuhi SPM

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian menunjukkan bahwa ketercapaian SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana sebesar 74,88% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 25,12%. Sementara ketercapaian SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana sebesar 76,77% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 23,23%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketercapaian SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana lebih baik dibandingkan SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan selisih 1,89%. Meskipun demikian keduanya dalam kategori memuaskan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kerida Laksana (2015). Penelitian tersebut meneliti tentang pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kategori memuaskan.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gunawan (1996:115) yang mengemukakan bahwa sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap proses belajar mengajar (PBM). Selain memberi makna penting bagi

tercipta dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, sarana dan prasarana sekolah berfungsi memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, dan memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana dalam penelitian ini dilihat berdasarkan lima komponen yaitu komponen lahan, komponen bangunan, komponen ruang pembelajaran umum, komponen ruang penunjang, dan komponen ruang pembelajaran khusus. Hal ini sebagaimana dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Didalam Lampirannya disebutkan bahwa Standar Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) meliputi: 1) Lahan, 2) Bangunan, 3) Ruang Pembelajaran Umum yang terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang praktik gambar teknik, 4) Ruang Pembelajaran Khusus meliputi ruang praktik yang disesuaikan dengan program keahlian, 5) Ruang Penunjang yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang uks, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Komponen Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Komponen Lahan

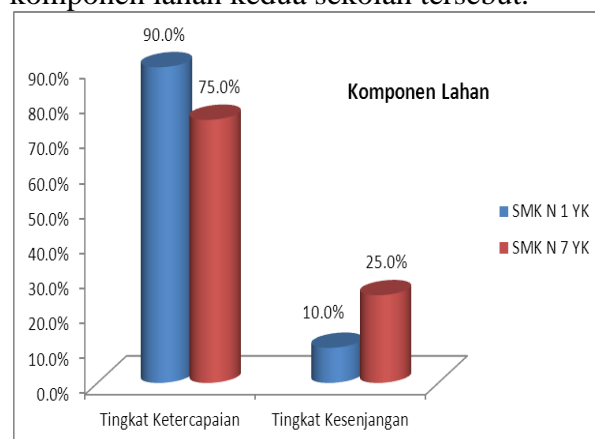
Komponen lahan memiliki standar pelayanan minimal yaitu sekolah memiliki luas lahan minimum yang dapat menampung sarana prasarana untuk melayani minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan belajar dengan masing-masing 32 siswa. Sekolah memiliki luas lahan efektif yang memenuhi unsur yaitu digunakan untuk

mendirikan bangunan, infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan praktik, memiliki luas lahan efektif adalah seratur per tigapuluh dikalikan luas lantai dasar bangunan ditambah infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara dan luas lahan praktik, memiliki kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana prasarna. Selain itu, sekolah memenuhi kondisi keamanan, sekolah terhindar dari gangguan, dan kondisi dan lokasi sekolah memenuhi unsur-unsur yaitu keberadaan sekolah di lokasi yang sesuai keperuntukannya, memiliki status hak atas tanah, ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan tidak dalam kondisi sedang sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Yogyakarta pada komponen lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 90.00% dan tingkat kesenjangan sebesar 10.00% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Untuk indikator luas lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 87.50% dan kesenjangan sebesar 12.50%. indikator keamanan memperoleh ketercapaian sebesar 83.33% dan kesenjangan sebesar 16.67%, indikator kenyamanan memperoleh ketercapaian sebesar 91.67% dan kesenjangan sebesar 8.33%. Sementara indikator ijin pemanfaatan lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan tidak ada (0%). Sementara untuk SMK Negeri 7 Yogyakarta pada komponen memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 75.00% dan tingkat kesenjangan sebesar 25.00% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Untuk indikator luas lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 45,83% dan kesenjangan sebesar 54,17%. indikator keamanan dan kenyamanan memperoleh ketercapaian sebesar 91,67% dan kesenjangan sebesar 8,33%. Sementara indikator ijin pemanfaatan

lahan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan tidak ada (0%).

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian komponen lahan pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 90% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 10%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 75% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan 25%. Berikut perbandingan komponen lahan kedua sekolah tersebut.



Gambar 3. Perbandingan Komponen Lahan

Dilihat berdasarkan persentase standar pelayanan minimal sarana prasarana menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada komponen lahan SMK Negeri 7 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK Negeri 1 Yogyakarta. Indikator komponen lahan di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling banyak adalah indikator keamanan, sedangkan di SMK Negeri 7 Yogyakarta pada indikator luas lahan. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pada indikator keamanan dan luas lahan.

2. Komponen Bangunan

Komponen bangunan memiliki standar pelayanan minimal yaitu sekolah memiliki luas lantai bangunan yang dihitung berdasarkan banyak dan jenis program keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program keahlian, bangunan

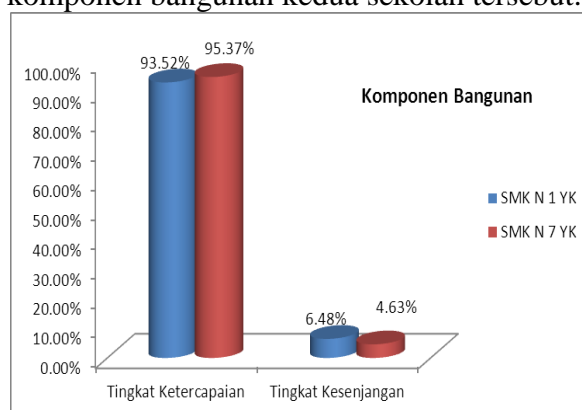
sekolah memenuhi ketentuan tata bangunan, kondisi sekolah dan bangunan sarpras sekolah memenuhi unsur-unsur keselamatan bangunan kondisi sekolah dan bangunan sarpras sekolah memenuhi unsur-unsur kesehatan bangunan, kondisi bangunan sekolah memenuhi unsur-unsur kenyamanan, bangunan sekolah dilengkapi dengan sistem keamanan, kondisi bangunan sekolah menggunakan daya listrik, kondisi bangunan sekolah memenuhi aspek legalitas, dan sekolah melaksanakan pemeliharaan bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Yogyakarta pada komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 93,52% dan tingkat kesenjangan sebesar 6,48% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Untuk indikator luas lantai memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 87,50% dan kesenjangan sebesar 12,50%. indikator keselamatan memperoleh ketercapaian sebesar 91,67% dan kesenjangan sebesar 8,33%, indikator kesehatan memperoleh ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan 0%, indikator kenyamanan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 83,33% dan kesenjangan sebesar 16,67%, indikator keamanan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 91,67% dan kesenjangan sebesar 8,33%. Sementara indikator daya listrik, indikator ijin bangunan, dan indikator pemeliharaan memperoleh tingkat ketercapaian 100% sedangkan tingkat kesenjangan sebesar 0%.

Sementara untuk SMK Negeri 7 Yogyakarta pada komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 95,37% dan tingkat kesenjangan sebesar 4,63% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Untuk indikator luas lantai dan kenyamanan masing-masing memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 91,67% dan kesenjangan sebesar 8,33%. Indikator keselamatan, kesehatan, daya listrik, ijin bangunan dan pemeliharaan masing-masing

memperoleh ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%. Indikator keamanan memperoleh ketercapaian sebesar 83,33% dan kesenjangan 16,67%.

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian komponen bangunan pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 93,52% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 6,48%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 95,37% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan 4,63%. Berikut perbandingan komponen bangunan kedua sekolah tersebut.



Gambar 4. Perbandingan Komponen Bangunan

Dilihat berdasarkan persentase standar pelayanan minimal sarana prasarana menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada komponen lahan SMK Negeri 1 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Indikator komponen lahan di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling banyak adalah indikator kenyamanan, sedangkan di SMK Negeri 7 Yogyakarta pada indikator keamanan. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pada indikator kenyamanan dan keamanan.

3. Komponen Ruang Pembelajaran Umum

Komponen ruang pembelajaran umum memiliki standar pelayanan minimal yaitu sekolah memiliki kelengkapan sarana prasarana antara lain: a) ruang kelas, b) ruang perpustakaan, c) ruang laboratorium biologi,

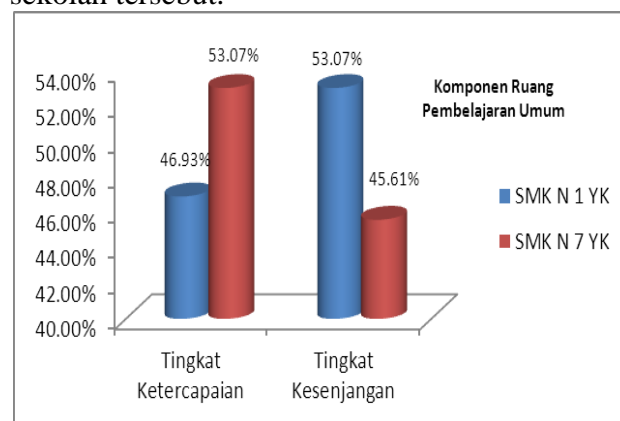
d) ruang laboratorium fisika, e) ruang laboratorium kimia, f) ruang laboratorium IPA, g) ruang laboratorium komputer, h) ruang laboratorium bahasa, i) ruang praktik gambar teknik, j) ruang pimpinan, k) ruang guru, l) ruang tata usaha, m) tempat beribadah, n) ruang konseling, o) ruang UKS, p) ruang organisasi kesiswaan, q) jamban, r) gudang, s) ruang sirkulasi, t) tempat bermain/olahraga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Yogyakarta pada komponen ruang pembelajaran umum memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 46.93% dan tingkat kesenjangan sebesar 53.07% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Komponen ruang pembelajaran memiliki tingkat kesenjangan yang paling tinggi dibandingkan komponen lain dalam pelaksanaan SPM sarana prasarana sekolah. Dari tabel 1 juga dapat diketahui bahwa untuk indikator kelengkapan sarana memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 41.67% dan kesenjangan sebesar 58.33%. indikator lab komputer memperoleh ketercapaian sebesar 87.50% dan kesenjangan sebesar 12.50%, indikator lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik memperoleh ketercapaian sebesar 25% dan kesenjangan 75%. Selanjutnya indikator ruang kelas memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%, serta indikator ruang perpustakaan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 87.50% dan kesenjangan sebesar 12.50%.

Sementara untuk SMK Negeri 7 Yogyakarta pada komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 54,39% dan tingkat kesenjangan sebesar 45,61% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Komponen ruang pembelajaran memiliki tingkat kesenjangan yang paling tinggi dibandingkan komponen lain dalam pelaksanaan SPM sarana prasarana sekolah. Dari tabel 1 juga dapat diketahui bahwa untuk indikator kelengkapan sarana

memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 41.67% dan kesenjangan sebesar 58.33%. indikator lab komputer memperoleh ketercapaian sebesar 87.50% dan kesenjangan sebesar 12.50%, indikator lab bahasa memperoleh ketercapaian sebesar 83,33% dan kesenjangan sebesar 16,67%. Indikator lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik memperoleh ketercapaian sebesar 25% dan kesenjangan 75%. Selanjutnya indikator ruang kelas dan ruang perpustakaan masing-masing memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%.

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian komponen ruang pembelajaran umum pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 46,93% dalam kategori kurang memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 53,07%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 54,39% dalam kategori kurang memuaskan dengan tingkat kesenjangan 45,61%. Berikut perbandingan komponen ruang pembelajaran umum kedua sekolah tersebut.



Gambar 5. Perbandingan Komponen Ruang Pembelajaran Umum

Dilihat berdasarkan persentase standar pelayanan minimal sarana prasarana menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada komponen ruang pembelajaran umum SMK Negeri 1 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Indikator komponen ruang pembelajaran umum di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling

banyak adalah indikator lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik. Sementara di SMK Negeri 7 Yogyakarta pada indikator lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pada indikator lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik.

4. **Komponen Ruang Penunjang**

Komponen ruang penunjang memiliki standar pelayanan minimal yaitu sekolah yang memiliki ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang tempat penyimpanan, tempat bermain/berolahraga sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler dengan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

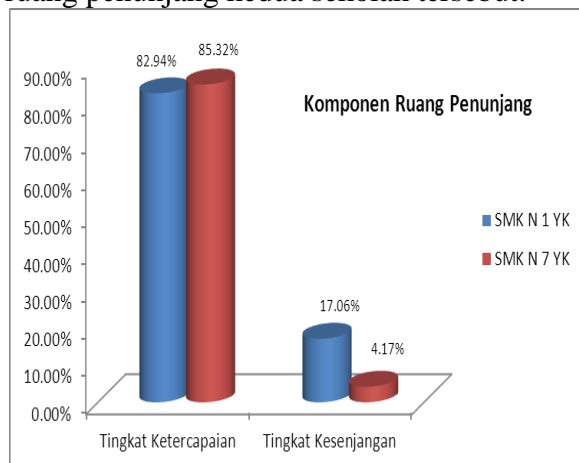
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Yogyakarta pada komponen ruang penunjang memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 82.94% dan tingkat kesenjangan sebesar 17.06% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Indikator ruang pimpinan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 91.67% dan kesenjangan sebesar 8.33%. indikator ruang guru memperoleh ketercapaian sebesar 75% dan kesenjangan sebesar 25%, indikator ruang TU memperoleh ketercapaian sebesar 79.17% dan kesenjangan 20.83%. Selanjutnya indikator tempat ibadah memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%, indikator ruang konseling memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 62.50% dan kesenjangan sebesar 37.50%, indikator ruang UKS memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 54.17% dan tingkat kesenjangan sebesar 45.83%, ruang organisasi siswa memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 83.33% dan tingkat kesenjangan sebesar

16.67%, jamban dan tempat bermain/olahraga memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan tingkat kesenjangan sebesar 0%, gudang dan ruang sirkulasi memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 83.33% dan tingkat kesenjangan sebesar 16.67%.

Sementara untuk SMK Negeri 7 Yogyakarta pada komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 85,32% dan tingkat kesenjangan sebesar 14,68% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Indikator ruang pimpinan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 87,50% dan kesenjangan sebesar 12,50%. indikator ruang guru memperoleh ketercapaian sebesar 79,17% dan kesenjangan sebesar 20,83%, indikator ruang TU memperoleh ketercapaian sebesar 75% dan kesenjangan 25%. Selanjutnya indikator tempat ibadah dan jamban memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 100% dan kesenjangan sebesar 0%, indikator ruang konseling memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 70,83% dan kesenjangan sebesar 29,17%, indikator ruang UKS memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 66,67% dan tingkat kesenjangan sebesar 33,33%, ruang organisasi siswa memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 83.33% dan tingkat kesenjangan sebesar 16.67%, tempat bermain/olahraga memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 95,83% dan tingkat kesenjangan sebesar 4,17%, gudang dan ruang sirkulasi memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 91,67% dan tingkat kesenjangan sebesar 8,33%.

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian komponen ruang penunjang pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 82,94% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 17,06%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 85,32% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan

4,17%. Berikut perbandingan komponen ruang penunjang kedua sekolah tersebut.



Gambar 6. Perbandingan Komponen Ruang Penunjang

Dilihat berdasarkan persentase standar pelayanan minimal sarana parasarana menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada komponen ruang penunjang SMK Negeri 1 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Indikator komponen ruang penunjang di SMK Negeri 1 Yogyakarta dan SMK Negeri 7 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling banyak adalah ruang UKS. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pada indikator ruang UKS.

5. Komponen Ruang Pembelajaran Khusus

Komponen ruang pembelajaran khusus memiliki standar pelayanan minimal yaitu untuk ruang praktik administrasi perkantoran sekolah harus memiliki luas minimum menampung 32 siswa, ruang praktik mengetik dan komputer, ruang praktik kearsipan, ruang praktik mesin kantor, ruang praktik perkantoran, ruang penyimpanan dan instruktur. Untuk ruang praktik akuntansi sekolah harus memiliki ruang praktik akuntansi, ruang praktik akuntansi lanjut, ruang praktik unit usaha, dan ruang penyimpanan dan instruktur. Untuk ruang praktik keahlian penjualan sekolah harus memiliki luas minimum ruang praktik program keahlian penjualan adalah 208 m² untuk menampung 32 peserta didik,

ruang praktik dasar-dasar penjualan, ruang praktik mesin-mesin kantor, ruang praktik pertokoan, ruang dan penyimpanan dan instruktur.

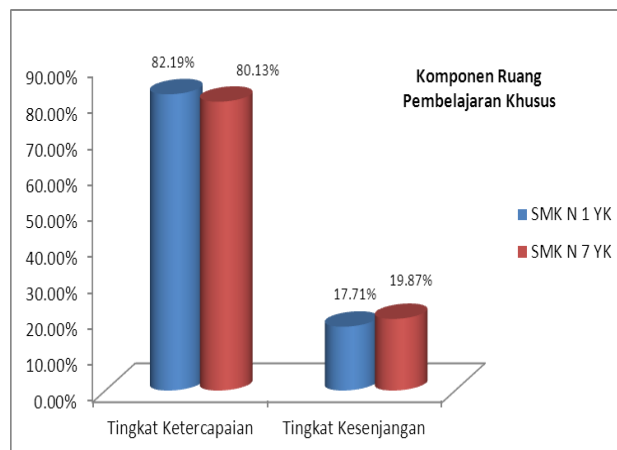
Sementara untuk ruang praktik multimedia, sekolah harus memiliki luas minimum ruang praktik program keahlian multimedia adalah 208 m² untuk menampung 32 peserta didik, yang meliputi : ruang praktik pengembangan perangkat lunak (*software*) 64 m², area kerja/studio rekam gambar dan suara 48 m², ruang perawatan dan perbaikan 48 m², ruang penyimpanan dan instruktur 48 m² ruang praktik keahlian multimedia, ruang praktik area kerja/studio rekam gambar dan suara, ruang praktik perawatan dan perbaikan serta adanya ruang praktik penyimpanan dan instruktur. Selanjutnya untuk ruang praktik program keahlian usaha perjalanan, pihak sekolah harus memiliki luas minimum ruang praktik program keahlian usaha jasa pariwisata adalah 176 m² untuk menampung 32 peserta didik, yang meliputi : ruang praktik ticketing 64 m², ruang praktik touring 32 m², ruang praktik guiding 32 m², ruang penyimpanan dan instruktur 48 m, ruang praktik tiketing, ruang praktik touring, ruang praktik pemandu wisata/guiding, dan ruang penyimpanan dan instruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk SMK Negeri 1 Yogyakarta pada komponen ruang pembelajaran khusus memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 82.29% dan tingkat kesenjangan sebesar 17,71% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Indikator ruang praktik keahlian administrasi perkantoran memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 91.67% dan kesenjangan sebesar 8.33%. indikator ruang praktik keahlian akuntansi memperoleh ketercapaian sebesar 71.67% dan kesenjangan sebesar 28.33%, dan indikator ruang praktik keahlian penjualan memperoleh ketercapaian sebesar 81.67% dan kesenjangan 18.33%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator yang paling

banyak memiliki kesenjangan pada komponen ruang pembelajaran khusus yaitu ruang praktik keahlian akuntansi.

Sementara untuk SMK Negeri 7 Yogyakarta pada komponen bangunan memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 80,13% dan tingkat kesenjangan sebesar 19,87% dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana. Indikator ruang praktik keahlian administrasi perkantoran memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 79,17% dan kesenjangan sebesar 20,83%. indikator ruang praktik keahlian akuntansi memperoleh ketercapaian sebesar 78,33% dan kesenjangan sebesar 21,67%, indikator ruang praktik keahlian penjualan memperoleh ketercapaian sebesar 80% dan kesenjangan 20%, indikator ruang praktik keahlian multimedia memperoleh ketercapaian sebesar 88,33% dan kesenjangan sebesar 11,67%, dan ruang praktik keahlian usaha perjalanan memperoleh ketercapaian sebesar 75% dan kesenjangan sebesar 35%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator yang paling banyak memiliki kesenjangan pada komponen ruang pembelajaran khusus yaitu ruang praktik keahlian usaha perjalanan

SMK Negeri 1 Yogyakarta memiliki program keahlian administrasi perkantoran, akuntansi dan penjualan. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki program keahlian administrasi perkantoran, akuntansi, penjualan, multimedia dan usaha perjalanan. Secara keseluruhan tingkat ketercapaian komponen ruang pembelajaran khusus pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 82,29% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 17,71%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 80,13% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan 19,87%. Berikut perbandingan komponen ruang pembelajaran khusus kedua sekolah tersebut.



Gambar 7. Perbandingan Komponen Ruang Pembelajaran Khusus

Dilihat berdasarkan persentase standar pelayanan minimal sarana prasarana menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada komponen ruang pembelajaran khusus SMK Negeri 7 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK Negeri 1 Yogyakarta. Indikator komponen ruang pembelajaran khusus di SMK Negeri 1 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling banyak adalah ruang praktik keahlian akuntansi sebesar 28,33%. Sementara indikator komponen ruang pembelajaran khusus di SMK Negeri 7 Yogyakarta yang memiliki tingkat kesenjangan yang paling banyak adalah ruang praktik keahlian usaha perjalanan sebesar 25%. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pada indikator ruang praktik keahlian akuntansi dan usaha perjalanan.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa ketercapaian SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana sebesar 74,88% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 25,12%. Sementara ketercapaian SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana sebesar 76,77% dalam kategori memuaskan dengan

tingkat kesenjangan sebesar 23,23%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketercapaian SMK Negeri 7 Yogyakarta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana lebih baik dibandingkan SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan selisih 1,89%. Meskipun demikian keduanya dalam kategori memuaskan. Hasil tersebut berdasarkan dari perolehan persentase lima komponen standar pelayanan minimal sarana dan prasarana yang meliputi:

1. Komponen Lahan secara keseluruhan tingkat ketercapaian pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 90% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 10%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 75% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan 25%.
2. Komponen bangunan secara keseluruhan tingkat ketercapaian pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 93,52% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 6,48%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 95,37% dalam kategori memuaskan dengan tingkat kesenjangan 4,63%.
3. Komponen ruang pembelajaran umum secara keseluruhan tingkat ketercapaian pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 46,93% dalam kategori kurang memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 53,07%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 54,39% dalam kategori kurang memuaskan dengan tingkat kesenjangan 45,61%.
4. Komponen ruang penunjang secara keseluruhan tingkat ketercapaian pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 82,94% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 17,06%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 85,32% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan 4,17%.
5. Komponen ruang pembelajaran khusus secara keseluruhan tingkat ketercapaian pada

SMK Negeri 1 Yogyakarta dalam memenuhi SPM sarana dan prasarana sebesar 82,29% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan sebesar 17,71%. Sementara SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 80,13% dalam kategori sangat memuaskan dengan tingkat kesenjangan 19,87%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi SMK Negeri 1 Yogyakarta
Tingkat kesenjangan SMK Negeri 1 Yogyakarta sebesar 25,12%. Oleh karena itu, pihak sekolah hendaknya dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah khususnya pada komponen ruang pembelajaran umum yang tingkat kesenjangannya mencapai 53,07% khusus pada indikator lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik.
2. Bagi SMK Negeri 7 Yogyakarta
Tingkat kesenjangan SMK Negeri 7 Yogyakarta sebesar 23,12%. Oleh karena itu, pihak sekolah hendaknya dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah khususnya pada komponen ruang pembelajaran umum yang tingkat kesenjangannya mencapai 45,61% khusus pada indikator lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab IPA dan ruang praktik gambar teknik.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini hanya mengkaji tingkat ketercapaian dan tingkat kesenjangan saja. Oleh karena itu, hendaknya untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab tingkat kesenjangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Adisaputra. 1996. *Anggaran Perusahaan Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66
Tahun 2010 Pasal 2 No 15 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi
Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Zamroni. 2011. *Dinamika Peningkatan Mutu*.
Yogyakarta : Galvin Kalam Utama